

Globalisasi dan Demokrasi:

Mengapa Arus Global Memicu Polarisasi Politik Domestik

Oleh: Rudy C Tarumingkeng



Rudy C Tarumingkeng: **Globalisasi dan Demokrasi: Mengapa Arus
Global Memicu Polarisasi Politik Domestik**

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyct75@gmail.com

10 Maret 2026

GLOBALISASI DAN DEMOKRASI: MENGAPA ARUS GLOBAL MEMICU POLARISASI POLITIK DOMESTIK

1. Pendahuluan

Selama beberapa dekade, globalisasi sering dipresentasikan sebagai proses yang pada dasarnya akan memperluas kemakmuran, mendorong keterbukaan, dan pada akhirnya memperkuat demokrasi. Logikanya cukup sederhana: ketika barang, modal, ide, manusia, dan informasi bergerak lebih bebas melintasi batas negara, masyarakat menjadi lebih terhubung, kelas menengah menguat, dan pemerintahan yang tertutup akan semakin sulit bertahan. Namun perkembangan beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa hubungan antara globalisasi dan demokrasi jauh lebih rumit. WTO masih mencatat perdagangan dunia dalam skala yang sangat besar, tetapi juga memperingatkan bahwa tarif yang meningkat dan ketidakpastian kebijakan perdagangan telah memperburuk prospek perdagangan global 2025, bahkan mendorong proyeksi kontraksi volume perdagangan barang dunia. Pada saat yang sama, V-Dem melaporkan bahwa 45 negara sedang mengalami autokratisasi pada 2024, dan menekankan bahwa tingkat polarisasi politik yang toksik membahayakan demokrasi.

Dengan demikian, persoalan utamanya bukan apakah globalisasi masih berlangsung, melainkan **bagaimana** globalisasi bekerja di dalam masyarakat demokratis. Globalisasi tidak selalu menghancurkan demokrasi secara langsung. Akan tetapi, ia sering menciptakan tekanan

sosial, ekonomi, dan kultural yang tidak terdistribusi merata, lalu tekanan itu dipolitisasi oleh partai, pemimpin, media, dan platform digital ke dalam narasi "kami versus mereka." Dalam arti inilah arus global memicu polarisasi politik domestik: bukan karena dunia menjadi lebih terhubung semata, tetapi karena keterhubungan itu menghasilkan pemenang dan pecundang, membuka ruang bagi kecemasan identitas, memperlemah rasa kontrol warga atas nasib kolektifnya, dan mempercepat sirkulasi informasi yang emosional dan memecah belah. Walter merangkum hal ini dengan sangat tajam: *backlash* terhadap globalisasi bukan terutama hasil perubahan besar opini massa yang tiba-tiba menjadi anti-globalisasi, melainkan hasil **politisasi** sikap-sikap skeptis yang sudah ada, sehingga menjadi jauh lebih menentukan secara elektoral dan kebijakan. (stefaniewalter.de)

Esai ini berargumen bahwa hubungan antara globalisasi dan polarisasi demokratis bekerja melalui lima saluran utama. Pertama, globalisasi ekonomi menciptakan dislokasi yang sangat terkonsentrasi di wilayah dan kelompok tertentu. Kedua, globalisasi politik dan kelembagaan menimbulkan kesenjangan antara lokasi keputusan dan lokasi akuntabilitas. Ketiga, globalisasi sosial-budaya memicu kecemasan tentang identitas, status, dan keutuhan komunitas. Keempat, globalisasi informasi melalui platform digital mempercepat disinformasi, memperkeras emosi, dan mengikis ruang deliberasi bersama. Kelima, semua tekanan itu menjadi berbahaya ketika dimobilisasi oleh aktor politik yang mengubah keresahan menjadi identitas politik antagonistik. Jadi, arus global tidak otomatis menghasilkan polarisasi, tetapi menyediakan bahan bakar yang sangat mudah dinyalakan di dalam demokrasi yang sudah tegang. ([Stefanie Walter](http://StefanieWalter))

2. Globalisasi dan Demokrasi: Hubungan yang Sejak Awal Tegang

Secara normatif, demokrasi modern dibangun di atas gagasan bahwa warga negara dalam suatu wilayah politik tertentu dapat memengaruhi

keputusan yang mengatur hidup mereka. Globalisasi, sebaliknya, mendorong banyak keputusan penting melintasi batas teritorial itu sendiri. Investasi dipindahkan ke luar negeri, harga dipengaruhi pasar global, pekerjaan bergantung pada rantai pasok lintas negara, aturan dipengaruhi organisasi internasional, dan arus informasi datang dari platform yang beroperasi secara transnasional. Walter menunjukkan bahwa *backlash* terhadap globalisasi menysar sekaligus tiga dimensi: ekonomi, politik, dan sosial-kultural. Ia juga mencatat bahwa para pemilih dan politisi makin sering mengkritik batasan yang diletakkan institusi internasional atas kedaulatan nasional. Di sinilah kita melihat ketegangan dasar antara demokrasi dan globalisasi: kebijakan makin transnasional, tetapi legitimasi tetap diminta secara nasional. ([Stefanie Walter](#))

Ketegangan ini tidak selalu meledak. Dalam periode ketika pertumbuhan relatif merata, lapangan kerja tercipta, dan elit politik berhasil menjelaskan manfaat keterbukaan, warga dapat menerima bahwa sebagian keputusan memang perlu dikoordinasikan di luar negara. Tetapi ketika hasil globalisasi tampak tidak adil, atau ketika biaya sosialnya terasa nyata di kota, desa, dan tempat kerja tertentu, warga mulai bertanya: siapa sebenarnya yang diuntungkan? siapa yang memutuskan? dan mengapa saya harus menanggung biayanya? Pertanyaan-pertanyaan ini bersifat demokratis, tetapi jawabannya sering kali dimonopoli oleh aktor populis yang menawarkan penjelasan sederhana: elit kosmopolitan, imigran, lembaga internasional, atau negara asing. Walter menekankan bahwa *backlash* globalisasi memang tidak lahir dari satu penyebab tunggal; faktor material dan nonmaterial hidup berdampingan, saling berinteraksi, dan dimediasi oleh mobilisasi politik. ([Stefanie Walter](#))

Di titik ini, penting untuk menolak dua kesalahan umum. Kesalahan pertama adalah menganggap globalisasi sendiri pasti pro-demokrasi. Kesalahan kedua adalah menganggap globalisasi sendiri pasti anti-

demokrasi. Keduanya terlalu sederhana. Yang lebih tepat adalah melihat bahwa globalisasi mengubah struktur peluang, ancaman, dan persepsi keadilan dalam masyarakat. Ia dapat memperluas pilihan, tetapi juga mengikis proteksi lama. Ia dapat membawa ide-ide baru, tetapi juga menimbulkan rasa kehilangan. Ia dapat memperkuat kelas menengah tertentu, tetapi juga menghancurkan basis ekonomi wilayah lain. Dengan kata lain, globalisasi tidak menghapus politik; ia justru membuat politik menjadi lebih tajam, karena lebih banyak aspek kehidupan sehari-hari kini dipersepsi sebagai hasil kekuatan luar yang tidak sepenuhnya dapat dikontrol oleh warga. ([Stefanie Walter](#))

3. Saluran Pertama: Dislokasi Ekonomi dan Geografi Ketidakadilan

Penjelasan paling klasik mengenai polarisasi akibat globalisasi berangkat dari ekonomi politik. Dalam teori ini, globalisasi memperbesar efisiensi agregat, tetapi manfaat dan bebannya tersebar sangat tidak merata. Keuntungan keterbukaan sering bersifat difus—harga lebih murah, pilihan lebih banyak, keuntungan konsumen, produktivitas yang naik—sedangkan kerugiannya sering sangat terkonsentrasi: pabrik tutup di satu kota, pekerjaan manufaktur hilang di satu wilayah, dan mobilitas sosial menurun dalam satu komunitas. Ketika kerugian itu dirasakan sebagai guncangan hidup, ia jauh lebih politis daripada manfaat agregat yang abstrak. Walter menegaskan bahwa *backlash* terhadap globalisasi terkait dengan percepatan globalisasi, deindustrialisasi, perubahan teknologi, dan ketimpangan, serta bahwa respons politik terhadap globalisasi sangat dipengaruhi oleh cara kerugian dan harapan dimobilisasi. ([Stefanie Walter](#))

Bukti empiris paling berpengaruh datang dari studi Autor, Dorn, Hanson, dan Majlesi tentang *China shock* di Amerika Serikat. Mereka menemukan bukti kuat adanya *ideological realignment* di pasar kerja lokal yang lebih terpapar impor dari Tiongkok. Wilayah-wilayah yang lebih terekspos perdagangan itu menunjukkan polarisasi ideologis yang meningkat,

peningkatan konsumsi media yang condong ke kanan, pertumbuhan sumbangan politik dari donor kiri dan kanan yang ekstrem tetapi bukan moderat, dan kecenderungan lebih besar untuk memilih kandidat Republik. Para penulis menekankan bahwa tekanan perdagangan dapat menggeser preferensi politik ke kanan dalam beberapa domain, dan ke polarisasi yang memperbesar dukungan pada ekstrem kiri dan ekstrem kanan dalam domain lain. Temuan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa guncangan perdagangan bukan hanya isu ekonomi; ia dapat mengubah struktur representasi politik itu sendiri.

([MIT Economics](#))

Makna sosial dari temuan itu lebih besar daripada sekadar “perdagangan membuat orang marah.” Yang terjadi adalah perubahan ekonomi memecah hubungan lama antara warga, partai moderat, dan institusi politik yang sebelumnya menyalurkan aspirasi mereka. Ketika pekerjaan hilang, serikat melemah, dan harga diri komunitas merosot, politik tidak lagi dipersepsi sebagai arena negosiasi biasa, melainkan sebagai pertarungan eksistensial. Autor dan koleganya menunjukkan bahwa dalam distrik yang lebih terekspos perdagangan, keuntungan elektoral mengalir pada kandidat yang lebih ideologis, sementara Demokrat moderat menjadi pihak yang paling sering kehilangan posisi. Ini berarti globalisasi ekonomi tidak sekadar memindahkan barang lintas batas; ia juga memindahkan keseimbangan di dalam sistem kepartaian. ([MIT Economics](#))

Pola serupa terlihat di Eropa, meskipun konteksnya berbeda. Algan, Guriev, Papaioannou, dan Passari menemukan hubungan yang kuat antara kenaikan pengangguran dan suara bagi partai anti-establishment di berbagai wilayah Eropa. Mereka juga menunjukkan bahwa kenaikan pengangguran berjalan seiring dengan menurunnya kepercayaan pada institusi politik nasional dan Eropa. Bahkan dalam pengujian *out-of-sample*, peningkatan pengangguran selama periode krisis 2007–2015 menjadi prediktor kuat suara Brexit. Penelitian itu menyimpulkan bahwa

ketidakamanan ekonomi akibat krisis merupakan penentu yang penting bagi populisme dan ketidakpercayaan politik. Dengan kata lain, dalam demokrasi Eropa pun, guncangan ekonomi yang terhubung dengan proses global tidak hanya memukul pasar tenaga kerja, tetapi juga mengikis kepercayaan yang menopang legitimasi demokratis.

Di sini terlihat satu hal penting: warga tidak selalu bereaksi terhadap tingkat kemiskinan absolut, tetapi terhadap **perubahan yang terasa sebagai kemunduran**. OECD menekankan bahwa kondisi ekonomi dan kerentanan yang dipersepsikan sangat penting dalam menjelaskan rendahnya kepercayaan kepada institusi publik, dan bahwa kerentanan finansial subjektif dapat sama pentingnya atau bahkan lebih penting daripada hasil ekonomi objektif. OECD juga mencatat bahwa ketimpangan yang meningkat berkaitan dengan rendahnya kepercayaan politik. Ini membantu menjelaskan mengapa masyarakat yang secara rata-rata masih tumbuh bisa tetap sangat marah: yang mereka rasakan bukan angka PDB, tetapi hilangnya kepastian, menurunnya status, dan rasa bahwa masa depan menjadi lebih rapuh. ([OECD](#))

Karena itu, arus global memicu polarisasi bukan hanya ketika ia "membuat orang miskin," tetapi ketika ia menciptakan **peta ketidakadilan yang dapat dilihat**. Satu daerah menjadi pusat logistik modern, sementara daerah lain menjadi bekas kota industri. Satu kelompok mendapatkan pekerjaan dalam ekonomi pengetahuan global, sementara kelompok lain melihat profesi turun-temurun mereka kehilangan nilai. Dalam situasi seperti itu, perbedaan ekonomi dengan cepat berubah menjadi perbedaan moral dan politik. Pemenang globalisasi dipersepsi kosmopolitan, terdidik, dan dekat dengan elit; yang kalah dipersepsi tertinggal, resah, dan siap mendukung perubahan radikal. Polarisasi lalu lahir bukan dari kemiskinan belaka, tetapi dari narasi bahwa negara lebih melayani dunia daripada melayani rakyatnya sendiri. ([Stefanie Walter](#))

4. Saluran Kedua: Kedaulatan yang Menipis dan Akuntabilitas yang Tersendat

Selain ekonomi, globalisasi memicu polarisasi karena ia menggeser lokasi pengambilan keputusan menjauh dari warga biasa. Banyak kebijakan kini dibentuk oleh lembaga regional, organisasi internasional, kesepakatan perdagangan, standar lintas batas, atau tekanan pasar global. Walter mencatat bahwa *backlash* terhadap globalisasi politik tampak ketika pemilih dan politisi mengkritik pembatasan yang diletakkan institusi internasional atas kedaulatan nasional. Dalam bahasa yang lebih sederhana, warga dapat memilih pemerintah nasional, tetapi banyak keputusan penting tampak tidak lagi sepenuhnya ada di tangan pemerintah itu. Di sinilah timbul perasaan *loss of control*—kehilangan kendali. ([Stefanie Walter](#))

Perasaan ini sangat berbahaya bagi demokrasi, karena demokrasi memerlukan keyakinan bahwa partisipasi politik masih dapat menghasilkan perubahan. Jika warga merasa bahwa apapun hasil pemilu, arah ekonomi tetap ditentukan pasar global, aturan tetap ditentukan lembaga internasional, dan migrasi atau arus barang tetap sulit dikendalikan, maka frustrasi terhadap demokrasi domestik akan meningkat. Ketika itu terjadi, politik mudah dibelah menjadi dua kubu: mereka yang menerima interdependensi sebagai keniscayaan modern, dan mereka yang menuntut pemulihan kontrol nasional. Brexit adalah contoh yang paling jelas, tetapi bukan satu-satunya. Walter secara eksplisit menempatkan Brexit, Trump, dan keberhasilan partai-partai nasionalis populis sebagai manifestasi dari *backlash* globalisasi. ([Stefanie Walter](#))

Di titik ini, globalisasi bukan lagi sekadar soal perdagangan atau investasi. Ia menjadi soal **siapa yang berhak memutuskan**. Debat tentang perjanjian dagang, pengadilan internasional, integrasi regional, dan aturan supranasional jarang tinggal teknokratis. Cepat atau lambat,

ia berubah menjadi debat tentang martabat politik: apakah bangsa masih berdaulat? apakah suara warga masih berarti? apakah kebijakan domestik boleh dikoreksi oleh lembaga di luar negeri? Bagi sebagian kelompok, terutama yang merasa sudah dirugikan secara ekonomi, jawaban teknokratik bahwa "aturan global penting untuk efisiensi" terdengar tidak memadai. Mereka tidak hanya meminta kebijakan yang lebih baik; mereka meminta **pengembalian agensi politik**. ([Stefanie Walter](#))

Masalahnya, tuntutan itu sering diartikulasikan dalam bahasa antagonisme: elit global versus rakyat nasional. Di sinilah polarisasi mengeras. Kelompok yang mendukung kerja sama internasional dipotret sebagai anti-rakyat, sedangkan kelompok yang menuntut kedaulatan penuh dipotret sebagai anti-modern atau xenofobik. Ketika dilema kedaulatan dipaksa masuk ke dalam kerangka moral yang keras, demokrasi kehilangan ruang kompromi. Yang tersisa adalah pertarungan simbolik tentang siapa yang benar-benar mewakili "rakyat." Ini adalah salah satu pintu masuk penting menuju populisme mayoritarian dan erosi norma demokratis. V-Dem menunjukkan bahwa di banyak negara, autokratisasi berjalan bersama penurunan kebebasan sipil, melemahnya pemilu yang bebas dan adil, serta penyensoran media. Polarisasi yang toksik membuat proses ini lebih mudah diterima karena lawan politik sudah dipandang bukan sekadar lawan, melainkan ancaman. ([V-Dem](#))

5. Saluran Ketiga: Kecemasan Identitas, Status, dan Budaya

Namun penjelasan ekonomi saja tidak cukup. Walter menegaskan bahwa *backlash* terhadap globalisasi mencakup dimensi sosial dan kultural, termasuk *anti-immigrant backlash*, protes terhadap pariwisata, dan kekhawatiran atas hilangnya budaya lokal. Ia juga menolak dikotomi sederhana antara sebab material dan nonmaterial, karena keduanya saling berinteraksi. Artinya, warga tidak memilih partai anti-globalisasi hanya karena penghasilannya turun, tetapi juga karena perubahan

ekonomi ditafsirkan sebagai ancaman terhadap cara hidup, status sosial, dan identitas kolektif mereka. ([Stefanie Walter](#))

Di sinilah tesis *cultural backlash* menjadi penting. Norris dan Inglehart berargumen bahwa dukungan pada populisme banyak bertumpu pada reaksi balik terhadap perubahan nilai yang cepat—terutama pada isu imigrasi, multikulturalisme, otoritas, dan identitas nasional. Bukan berarti faktor ekonomi tidak penting, tetapi perubahan budaya memberi bahasa moral bagi kecemasan yang lebih luas. Ketika arus manusia, simbol, gaya hidup, dan norma lintas batas meningkat, sebagian warga mengalaminya bukan sebagai keterbukaan, melainkan sebagai dislokasi budaya. Mereka merasa dunia yang familiar semakin tidak dikenali, dan politik lalu menjadi arena untuk mempertahankan batas-batas identitas yang dirasa terancam. ([United Nations](#))

Aspek pentingnya adalah bahwa kecemasan identitas sering kali tumbuh paling kuat ketika dikaitkan dengan status. Seseorang bisa saja tidak mengalami penurunan pendapatan besar, tetapi tetap merasa posisinya merosot secara simbolik. Pekerja yang dulu bangga menjadi tulang punggung ekonomi nasional kini merasa profesinya dipandang usang. Kelompok mayoritas yang dulu merasa budaya mereka menjadi norma umum kini merasa harus berbagi ruang dengan nilai, bahasa, dan simbol yang semakin beragam. Di level mikro, ini adalah pengalaman kehilangan pengakuan. Di level politik, ia mudah diterjemahkan menjadi tuntutan pemulihan “keaslian,” “tradisi,” atau “kedaulatan budaya.” Globalisasi sosial-budaya dengan demikian memicu polarisasi karena ia mengganggu hirarki status yang sebelumnya terasa stabil. ([United Nations](#))

Menariknya, Algan dan kolega menemukan bahwa kenaikan pengangguran di Eropa berkorelasi kuat dengan suara bagi partai anti-establishment dan rendahnya kepercayaan institusional, tetapi pengaruhnya terhadap sikap terhadap imigran tidak sesederhana yang

sering diasumsikan. Ini justru memperkuat argumen bahwa polarisasi tidak lahir dari satu sebab tunggal. Isu ekonomi dapat melemahkan kepercayaan kepada elit dan institusi, lalu aktor politik menyalurkan kekecewaan itu ke isu identitas tertentu—misalnya imigrasi, integrasi regional, atau minoritas budaya—tergantung konteks nasional. Jadi, globalisasi memicu polarisasi domestik bukan dengan satu jalur lurus, melainkan lewat kombinasi keresahan ekonomi dan bahasa budaya yang membuat keresahan itu terasa konkret.

6. Saluran Keempat: Arus Informasi Global dan Krisis Ruang Publik Nasional

Jika perdagangan dan migrasi adalah wajah lama globalisasi, maka platform digital adalah wajah terbarunya. OECD menegaskan bahwa demokrasi bergantung pada arus informasi yang bebas, beragam, dan independen, tetapi penyebaran informasi palsu atau menyesatkan—baik oleh aktor domestik maupun asing—menciptakan kebingungan, mempolarisasi debat publik, dan merusak proses demokratis. OECD juga menekankan bahwa digitalisasi telah mengubah secara fundamental jangkauan dan dampak misinformasi, serta bahwa jangkauan global platform melampaui yurisdiksi regulasi nasional. Dengan kata lain, negara demokratis sekarang menghadapi ruang publik yang sebagian besar dibentuk oleh infrastruktur global, sementara aturan dan akuntabilitasnya masih terutama nasional. ([OECD](#))

Perubahan ini sangat besar. Dulu, ruang publik nasional disusun oleh media massa yang relatif teritorial: surat kabar nasional, televisi domestik, radio, dan debat publik yang dimediasi institusi jurnalistik. Kini, warga mengonsumsi konten dari platform global yang mengutamakan keterlibatan, kecepatan, dan emosi. OECD mencatat bahwa konten yang menimbulkan respons emosional sangat menarik dan cenderung viral. Reuters Institute melaporkan bahwa keterlibatan dengan media tradisional terus menurun, sementara ketergantungan

pada media sosial, video, dan personalitas atau influencer meningkat. Ini berarti demokrasi tidak lagi beroperasi di ruang publik yang sama teritorial dan institusionalnya seperti sebelumnya. Ia beroperasi di ruang yang lebih cair, lebih global, lebih cepat, tetapi juga lebih rapuh secara epistemik. ([OECD](#))

Di titik ini, globalisasi informasi menjadi mesin polarisasi karena ia merombak syarat-syarat deliberasi demokratis. Demokrasi membutuhkan waktu untuk menimbang, memverifikasi, dan memperdebatkan. Platform digital memberi hadiah pada yang sebaliknya: yang tercepat, paling emosional, paling identitas-sentris, dan paling mudah dibagikan. OECD menekankan bahwa digitalisasi memberi tanah subur bagi penyebaran cepat informasi salah; bahkan konten palsu dan menyesatkan dapat merusak kohesi sosial, menabur ketidakpercayaan, dan membuat konsensus atas kebijakan menjadi sulit dibangun. Ketika isu global—perdagangan, perang, migrasi, pandemi—masuk ke ruang digital seperti ini, ia tidak dibahas secara deliberatif, melainkan dipecah menjadi simbol-simbol permusuhan. ([OECD](#))

UNESCO menambahkan lapisan penting lain. Dalam survei terhadap 500 kreator konten di 45 negara, UNESCO menemukan bahwa 62% tidak melakukan pemeriksaan fakta yang ketat dan sistematis sebelum membagikan informasi, padahal para kreator digital telah menjadi sumber informasi penting bagi banyak orang. Temuan ini sangat relevan bagi tema kita. Arus global hari ini tidak hanya membawa barang dan manusia, tetapi juga klaim, rumor, potongan video, dan narasi politik yang berpindah sangat cepat antarnegara. Bila penjaga gerbang informasinya semakin banyak berasal dari aktor yang pengaruhnya tinggi tetapi verifikasi lemah, maka isu-isu global akan semakin mudah diterjemahkan menjadi kemarahan domestik yang simplistik. ([unesco.org](#))

V-Dem menegaskan bahwa polarisasi, ujaran kebencian oleh partai, dan penyebaran disinformasi oleh pemerintah saling memperkuat dari waktu ke waktu, lalu mendorong autokratisasi. Ini sangat penting: polarisasi bukan hanya hasil perbedaan pendapat yang normal dalam demokrasi. Ia menjadi berbahaya ketika masyarakat terbelah menjadi kubu antagonistik "kami" versus "mereka" sehingga perbedaan politik merusak relasi sosial di luar politik. Ketika arus informasi global memperkeras antagonisme itu, demokrasi tidak lagi menjadi kompetisi yang diatur oleh aturan bersama, melainkan arena delegitimasi total terhadap lawan. (V-Dem)

7. Saluran Kelima: Politik Pengusaha Polarisasi

Meski demikian, tekanan ekonomi, kultural, dan digital tidak otomatis berubah menjadi polarisasi. Diperlukan aktor politik yang mampu mengartikulasikannya. Di sini tesis Walter sangat penting: *backlash* globalisasi menjadi berbahaya bukan semata karena sikap anti-globalisasi bertambah besar, tetapi karena aktor skeptis terhadap globalisasi menjadi lebih berpengaruh secara politik dan berhasil mempolitikasi isu-isu terkait globalisasi. Dengan kata lain, globalisasi menyediakan bahan mentah, tetapi partai, pemimpin, dan entrepreneur politiklah yang mengubahnya menjadi identitas partisan yang mobilisatoris. (Stefanie Walter)

Proses ini biasanya mengikuti pola yang relatif serupa. Pertama, ada guncangan atau keresahan: pabrik tutup, harga naik, migrasi meningkat, perang jauh memengaruhi harga energi, atau institusi supranasional dipersepsi menekan kebijakan domestik. Kedua, entrepreneur politik menyederhanakan penyebabnya: globalisasi, elit, imigran, birokrat internasional, atau negara asing. Ketiga, mereka mengubah kebijakan menjadi identitas: bukan lagi debat teknis tentang perdagangan atau migrasi, melainkan pertanyaan tentang siapa yang membela bangsa, siapa yang membela rakyat biasa, dan siapa yang menjual negara.

Keempat, lawan politik tidak lagi dikritik hanya karena salah, tetapi karena dianggap tidak sah secara moral. Di sinilah polarisasi tumbuh paling cepat. ([Stefanie Walter](#))

Pola itu terlihat di Amerika Serikat, Inggris, dan berbagai negara Eropa. Walter menyebut Brexit dan kemenangan Trump sebagai manifestasi penting *backlash* globalisasi. Algan dan kolega juga menempatkan Brexit, Trump, dan kebangkitan partai populis Eropa dalam satu lanskap yang sama, yakni krisis kepercayaan dan kenaikan politik anti-establishment sesudah guncangan ekonomi besar. Yang penting di sini bukan bahwa semua negara bergerak ke kanan secara identik, melainkan bahwa isu-isu yang berasal dari arus global memberi entrepreneur politik peluang untuk membingkai kompetisi domestik sebagai pertarungan antara rakyat dan sistem global. ([Stefanie Walter](#))

Di sinilah demokrasi menghadapi masalah yang paling sulit. Demokrasi membutuhkan oposisi, tetapi oposisi yang sehat masih mengakui legitimasi lawan. Politik globalisasi sering didorong ke arah sebaliknya: lawan dianggap kaki tangan globalisme, pengkhianat nasional, atau musuh identitas mayoritas. Saat narasi seperti itu mengeras, kompromi tampak seperti pengkhianatan. Pusat politik melemah, moderat terjepit, dan partai terdorong untuk menyesuaikan diri dengan bahasa yang lebih keras agar tidak kehilangan basis pemilih. Autor dan koleganya menunjukkan bahwa dalam konteks *China shock*, justru politisi moderat yang paling banyak kehilangan ruang. Ini bukan detail kecil; ini menjelaskan mengapa globalisasi sering tidak hanya mengubah kebijakan, tetapi juga mengubah **struktur insentif** dalam demokrasi itu sendiri. ([MIT Economics](#))

8. Mengapa Polarisasi yang Dipicu Arus Global Berbahaya bagi Demokrasi?

Tidak semua polarisasi merusak demokrasi. Dalam kadar tertentu, perbedaan pendapat yang tajam bisa menjadi bagian wajar dari

kompetisi demokratis. Yang menjadi berbahaya adalah apa yang V-Dem sebut sebagai **toxic levels of political polarization**: ketika masyarakat terbelah ke dalam kubu-kubu antagonistik dan perbedaan politik mulai memengaruhi hubungan sosial dan keluarga di luar arena politik. V-Dem juga menunjukkan bahwa polarisasi seperti ini berjaln erat dengan disinformasi dan peningkatan praktik autokratis. ([V-Dem](#))

Ada beberapa alasan mengapa ini berbahaya. Pertama, polarisasi mengikis kepercayaan. OECD menunjukkan bahwa kerentanan ekonomi dan ketimpangan berkaitan dengan rendahnya kepercayaan pada institusi publik. Algan dan kolega menunjukkan bahwa guncangan ekonomi lebih kuat pengaruhnya terhadap kepercayaan pada institusi politik daripada terhadap kepercayaan interpersonal secara umum. Ketika kepercayaan pada institusi menurun, warga menjadi lebih siap menerima penjelasan bahwa sistem telah dicuri atau dibajak. Demokrasi lalu tidak lagi dianggap arena yang bisa diperbaiki, tetapi sebagai mekanisme yang dicurigai sejak awal. ([OECD](#))

Kedua, polarisasi mempersulit pemecahan masalah yang secara inheren lintas batas. Banyak tantangan global—perdagangan, iklim, migrasi, pandemi, keamanan siber—tidak bisa ditangani hanya dalam kerangka nasional. Tetapi justru karena masalah-masalah itu berakar pada arus global, mereka menjadi bahan bakar politik domestik yang memecah. OECD menulis bahwa mis- dan disinformasi membuat pembangunan konsensus sosial menjadi sulit. Ketika setiap isu global dibingkai sebagai ancaman identitas, demokrasi kehilangan kapasitas untuk menghasilkan kebijakan yang kompleks dan kooperatif. ([OECD](#))

Ketiga, polarisasi memberi peluang bagi pemimpin yang ingin melemahkan demokrasi atas nama melindungi bangsa. V-Dem mencatat bahwa media censorship menjadi salah satu praktik paling umum di negara-negara yang sedang mengalami autokratisasi, diikuti penurunan kebebasan dan keadilan pemilu serta represi terhadap masyarakat sipil.

Dalam masyarakat yang sudah sangat terpolarisasi, langkah-langkah seperti itu lebih mudah dibenarkan: pembatasan media dianggap perlu melawan propaganda, pengetatan oposisi dianggap perlu melawan musuh internal, dan sentralisasi kekuasaan dianggap perlu untuk mengembalikan kontrol nasional. Jadi, polarisasi yang dipicu arus global dapat berakhir pada paradoks: atas nama merebut kembali kedaulatan rakyat, demokrasi justru dikurangi. ([V-Dem](#))

9. Mengapa Tidak Semua Negara Bereaksi Sama?

Meski saluran-saluran di atas bersifat umum, respons tiap negara terhadap globalisasi tidak identik. Ada beberapa alasan.

Pertama, **institusi kompensasi**. Negara yang memiliki perlindungan sosial lebih kuat, pelatihan ulang tenaga kerja yang efektif, dan kapasitas fiskal untuk membantu wilayah yang tertinggal cenderung lebih mampu menyerap guncangan global tanpa meledak ke polarisasi yang ekstrem. OECD berulang kali menekankan pentingnya perlindungan sosial, keadilan ekonomi, dan rasa aman masa depan bagi kepercayaan publik. Jika warga merasa negara hadir ketika pasar global mengubah hidup mereka, mereka lebih kecil kemungkinannya memandang globalisasi sebagai pengkhianatan total. ([OECD](#))

Kedua, **sistem kepartaian dan strategi elit**. Walter menekankan bahwa yang menentukan bukan hanya adanya sikap skeptis terhadap globalisasi, tetapi kapan dan bagaimana sikap itu dipolitisasi. Di negara dengan partai-partai yang masih mampu menyerap keresahan ke dalam kebijakan moderat, tekanan global bisa dikelola. Sebaliknya, di negara yang partai-partai utamanya kehilangan kredibilitas atau saling meniru bahasa ekstrem, arus global lebih mudah diterjemahkan menjadi antagonisme tajam. ([Stefanie Walter](#))

Ketiga, **struktur ekonomi dan geografi kerugian**. Autor menunjukkan betapa pentingnya konsentrasi lokal dari paparan perdagangan. Ini

berarti dua negara yang sama-sama terbuka tidak selalu akan menunjukkan polarisasi yang sama. Yang menentukan adalah bagaimana keterbukaan itu terdistribusi: sektor apa yang terpukul, daerah mana yang tertinggal, dan seberapa jauh wilayah-wilayah kalah itu merasa tidak punya masa depan. ([MIT Economics](#))

Keempat, **arsitektur media dan platform**. Reuters Institute menunjukkan bahwa konsumsi berita kini makin berpindah ke media sosial, video, dan personalitas, sementara OECD menegaskan bahwa platform global memiliki jangkauan yang melampaui regulasi nasional. Negara yang memiliki media publik kuat, literasi informasi yang lebih baik, dan kapasitas regulasi yang lebih memadai kemungkinan lebih tahan terhadap eskalasi polarisasi digital. Sebaliknya, di negara dengan kepercayaan media yang rendah dan ruang digital yang dipenuhi influencer tanpa verifikasi, isu global akan lebih cepat berubah menjadi amarah domestik. ([Reuters Institute](#))

10. Apakah Solusinya Mengurangi Globalisasi?

Tidak sesederhana itu. Ini poin yang sangat penting. Walter menunjukkan bahwa *backlash* terhadap globalisasi tidak bisa dipahami sebagai penolakan total terhadap semua bentuk globalisasi; sering kali orang menolak satu dimensi globalisasi tetapi menerima dimensi lain. Seseorang bisa menolak integrasi politik supranasional tetapi mendukung perdagangan bebas. Yang lain bisa kritis terhadap perdagangan global tetapi justru mendukung kerja sama internasional untuk iklim. Ini berarti solusi atas polarisasi tidak terletak pada "menutup diri" secara total, melainkan pada **merancang bentuk keterbukaan yang lebih adil, lebih terlindungi, dan lebih akuntabel secara demokratis**. ([Stefanie Walter](#))

Dari sisi ekonomi, itu berarti kompensasi yang nyata bagi pihak yang dirugikan, investasi ulang pada wilayah yang tertinggal, dan kebijakan industri atau sosial yang tidak membiarkan kelompok tertentu

menanggung seluruh biaya keterbukaan. Dari sisi politik, itu berarti memperkuat hubungan antara keputusan transnasional dan akuntabilitas domestik, sehingga warga tidak merasa dipaksa menerima aturan yang tak bisa mereka pengaruhi. Dari sisi budaya, itu berarti mengelola perubahan dengan cara yang tidak merendahkan kekhawatiran warga, tetapi juga tidak membiarkan kecemasan identitas berubah menjadi kebencian terhadap kelompok lain. Dari sisi informasi, itu berarti memperkuat integritas ruang publik. OECD menekankan perlunya pendekatan komprehensif untuk menjaga integritas informasi, sementara UNESCO menunjukkan kebutuhan besar akan pelatihan verifikasi bagi kreator digital. ([OECD](#))

Dengan kata lain, yang perlu dikoreksi bukan keterhubungan dunia itu sendiri, melainkan **cara manfaat dan biaya keterhubungan itu dimediasi oleh institusi demokratis**. Jika demokrasi gagal membagi manfaat secara adil, gagal menjelaskan keputusan yang rumit, gagal menjaga ruang informasi yang sehat, dan gagal memberi rasa aman atas perubahan yang cepat, maka arus global akan terus menjadi sumber polarisasi. Tetapi bila demokrasi mampu menyerap guncangan, memperbarui kontrak sosial, dan menjaga kompetisi politik tetap dalam batas legitimasi bersama, maka globalisasi tidak harus berakhir sebagai ancaman. ([OECD](#))

11. Refleksi Penutup

Pertanyaan “mengapa arus global memicu polarisasi politik domestik?” pada akhirnya tidak bisa dijawab dengan satu sebab tunggal. Arus global memicu polarisasi karena ia mengubah kehidupan warga dengan cara yang sangat tidak merata, lalu perubahan itu masuk ke dalam arena demokrasi yang masih terikat pada negara-bangsa, sementara informasi tentang perubahan itu kini beredar melalui platform digital yang global, cepat, dan emosional. Dalam kondisi seperti itu, demokrasi menghadapi tekanan berlapis: ekonomi yang menimbulkan ketidakamanan, budaya

yang menimbulkan kecemasan status, institusi yang dianggap jauh, dan ruang publik yang dipenuhi disinformasi. Walter tepat ketika menyatakan bahwa persoalan utamanya adalah politisasi. Sikap-sikap skeptis terhadap globalisasi tidak otomatis berbahaya; ia menjadi berbahaya ketika diubah menjadi proyek politik yang antagonistik dan anti-pluralis. ([Stefanie Walter](#))

V-Dem menunjukkan bahwa polarisasi toksik sudah menjadi ancaman nyata bagi demokrasi, dan bahwa disinformasi, ujaran kebencian, serta autokratisasi saling memperkuat. Autor menunjukkan bahwa guncangan perdagangan dapat menggeser politik ke kanan dan menjauh dari moderasi. Algan dan kolega menunjukkan bahwa ketidakamanan ekonomi dapat menurunkan kepercayaan pada institusi dan memperkuat suara anti-establishment. OECD menegaskan bahwa kerentanan subjektif, ketimpangan, dan krisis informasi memperburuk kepercayaan. UNESCO menunjukkan bahwa ekosistem kreator digital yang kini memengaruhi opini publik masih lemah dalam verifikasi fakta. Semua temuan ini mengarah pada satu kesimpulan yang sama: **globalisasi tidak sekadar memperluas dunia; ia juga mengubah medan emosional dan institusional demokrasi di dalam negeri.** ([V-Dem](#))

Maka, tantangan terbesar demokrasi masa kini bukan memilih antara dunia terbuka atau dunia tertutup. Tantangannya adalah bagaimana membangun demokrasi yang cukup kuat untuk hidup di dunia yang terbuka tanpa kehilangan kohesi sosial, rasa keadilan, dan kapasitas deliberatifnya. Bila demokrasi tidak mampu melakukan itu, setiap gelombang baru globalisasi—entah perdagangan, migrasi, AI, atau platform digital—akan terus diterjemahkan ke dalam konflik domestik yang makin tajam. Tetapi bila demokrasi mampu memperbarui kontrak sosialnya, memperkuat integritas informasinya, dan memulihkan rasa bahwa warga masih memiliki kendali atas masa depan bersama, maka keterhubungan global tidak harus menjadi sumber perpecahan. Ia justru

bisa menjadi sumber pembelajaran bersama yang lebih matang dan lebih adil.

Berikut **Glosarium** dan **Daftar Pustaka gaya APA 7** untuk topik **“Globalisasi dan Demokrasi: Mengapa Arus Global Memicu Polarisasi Politik Domestik.”** Istilah-istilah di bawah ini merujuk pada literatur akademik dan laporan resmi yang paling relevan untuk membaca hubungan antara globalisasi, keterkejutan ekonomi, identitas, ruang publik digital, kepercayaan pada institusi, dan erosi demokrasi. ([Annual Reviews](#))

Glosarium

1. Globalisasi

Proses meningkatnya keterhubungan lintas batas dalam perdagangan, investasi, migrasi, teknologi, dan informasi, sehingga keputusan yang memengaruhi kehidupan warga makin sering diproduksi atau dipengaruhi oleh kekuatan di luar negara-bangsa. ([stefaniewalter.de](#))

2. Demokrasi liberal

Tatanan politik yang bertumpu pada pemilu yang bebas dan adil, kebebasan sipil, pluralisme, rule of law, serta ruang oposisi yang sah. Dalam laporan V-Dem, pelemahan pada unsur-unsur ini menjadi tanda utama autokratisasi. ([V-Dem](#))

3. Polarisasi politik

Keadaan ketika perbedaan politik antarkelompok masyarakat makin tajam dan stabil, sehingga kompromi menjadi lebih sulit dan lawan politik dipandang semakin jauh. Dalam literatur mutakhir, polarisasi sering meningkat ketika guncangan ekonomi dan isu global dipolitisasi secara identitas. ([Queensland Economy Watch](#))

4. Polarisasi politik toksik

Tingkat polarisasi ketika masyarakat terbelah ke dalam kubu antagonistik "kami versus mereka" sampai perbedaan politik merembet ke relasi sosial dan keluarga, serta mulai mengancam kualitas demokrasi. V-Dem memakai istilah ini untuk menandai polarisasi yang berbahaya bagi demokrasi. ([V-Dem](#))

5. Backlash terhadap globalisasi

Reaksi politik dan sosial terhadap keterbukaan global, yang dapat muncul sebagai skeptisisme terhadap perdagangan bebas, lembaga internasional, migrasi, atau perubahan budaya yang diasosiasikan dengan arus global. Walter menekankan bahwa *backlash* ini menjadi signifikan ketika dipolitisasi dan diubah menjadi proyek politik yang mobilisatoris. ([Annual Reviews](#))

6. Dislokasi ekonomi

Gangguan pada pekerjaan, pendapatan, sektor, atau wilayah tertentu akibat kompetisi perdagangan, relokasi industri, perubahan teknologi, atau krisis yang berkaitan dengan integrasi global. Studi Autor dkk. menunjukkan bahwa paparan perdagangan dapat mendorong realignment ideologis dan polarisasi elektoral di wilayah yang terdampak. ([American Economic Association](#))

7. Populisme

Gaya atau logika politik yang membelah masyarakat menjadi "rakyat murni" versus "elit korup", lalu mengklaim bahwa hanya satu kekuatan politik yang benar-benar mewakili kehendak rakyat. Dalam konteks

globalisasi, populisme sering tumbuh ketika keresahan ekonomi dan budaya diterjemahkan ke dalam bahasa anti-establishment.

([IDEAS/RePEc](#))

8. Cultural backlash

Reaksi terhadap perubahan nilai, norma, dan identitas yang dirasa terlalu cepat—misalnya pada isu multikulturalisme, imigrasi, kosmopolitanisme, dan otoritas tradisional. Norris dan Inglehart memakainya untuk menjelaskan mengapa perubahan budaya dapat memicu dukungan pada populisme otoritarian. ([United Nations](#))

9. Kedaulatan nasional

Gagasan bahwa keputusan politik yang mengikat warga seharusnya berada di bawah kendali institusi nasional yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam *backlash* globalisasi, tuntutan “merebut kembali kontrol” sering lahir dari persepsi bahwa keputusan penting telah bergeser ke pasar atau lembaga transnasional. ([Annual Reviews](#))

10. Kepercayaan pada institusi

Keyakinan warga bahwa pemerintah, parlemen, partai, dan institusi publik bertindak kompeten, responsif, dan berintegritas. OECD menunjukkan bahwa rendahnya kepercayaan berkaitan erat dengan kerentanan ekonomi yang dirasakan, ketimpangan, polarisasi, dan meningkatnya misinformasi. ([OECD](#))

11. Integritas informasi

Kondisi ketika ruang informasi memungkinkan warga mengakses sumber yang beragam, dapat diverifikasi, dan tidak didominasi oleh konten palsu atau manipulatif. OECD menempatkan integritas informasi sebagai prasyarat penting bagi demokrasi yang sehat. ([OECD](#))

12. Misinformasi

Informasi salah atau menyesatkan yang disebarluaskan tanpa niat jahat yang jelas, tetapi tetap dapat merusak kualitas debat publik dan pengambilan

keputusan. OECD menilai misinformasi sebagai ancaman serius terhadap demokrasi dan kebijakan publik. ([OECD](#))

13. Disinformasi

Informasi palsu atau menyesatkan yang disebarkan secara sengaja untuk menipu, memanipulasi, atau memecah publik. Dalam lingkungan digital yang terplatformisasi, disinformasi dapat mempercepat polarisasi dan menurunkan kepercayaan terhadap institusi demokratis. ([OECD](#))

14. Ruang publik digital

Arena pertukaran informasi, opini, dan mobilisasi politik yang berlangsung di platform online lintas batas. Reuters Institute dan OECD sama-sama menunjukkan bahwa ruang ini makin dibentuk oleh platform sosial, video, personalitas, dan algoritma, sehingga logika debat publik makin berubah. ([Oxford University Research Archive](#))

15. Autokratisasi / democratic backsliding

Proses mundurnya kualitas demokrasi secara bertahap, misalnya melalui pelemahan kebebasan berekspresi, penyensoran media, ketidakadilan pemilu, atau penyempitan ruang oposisi. V-Dem menunjukkan bahwa polarisasi yang tinggi sering berjalan beriringan dengan autokratisasi. ([V-Dem](#))

Daftar Pustaka (APA 7)

Algan, Y., Guriev, S., Papaioannou, E., & Passari, E. (2017). *The European trust crisis and the rise of populism*. *Brookings Papers on Economic Activity*, 48(2), 309–400.

Autor, D., Dorn, D., Hanson, G., & Majlesi, K. (2020). Importing political polarization? The electoral consequences of rising trade exposure. *American Economic Review*, 110(10), 3139–3183.

Newman, N., Ross Arguedas, A., Robertson, C. T., Nielsen, R. K., & Fletcher, R. (2025). *Digital news report 2025*. Reuters Institute for the Study of Journalism.

Norris, P., & Inglehart, R. (2019). *Cultural backlash: Trump, Brexit, and authoritarian populism*. Cambridge University Press.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *Facts not fakes: Tackling disinformation, strengthening information integrity*. OECD Publishing.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *Lack of trust in institutions and political engagement*. OECD.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *OECD survey on drivers of trust in public institutions: 2024 results*. OECD Publishing.

UNESCO. (2024, November 27). *2/3 of digital content creators do not check their facts before sharing and want to learn how to do so: UNESCO survey*.

V-Dem Institute. (2025). *Democracy report 2025: 25 years of autocratization – Democracy trumped?* V-Dem Institute.

Walter, S. (2021). The backlash against globalization. *Annual Review of Political Science*, 24, 421–442.

World Trade Organization. (2025). *Global trade outlook and statistics: April 2025*. WTO.

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 10 Maret 2026
Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69acf5b9-8798-839d-83f0-cffa92d7b98c>